

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam memasuki pasar kerja. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya akses pendidikan, dan minimnya keterampilan kerja spesifik menjadi alasan utama rendahnya tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas. Menjadi disabilitas sering diidentikkan dengan ketidakberuntungan dalam hidup karena kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan persamaan hak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial dan akses terhadap sarana prasarana (Dewi, 2015). Oleh karena itu para penyandang disabilitas yang banyak menghadapi hambatan terutama dalam hal ekonomi dan sosial perlu diprioritaskan agar keluar dari hambatan tersebut.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai suatu istilah umum yang mencakup gangguan (*impairments*), keterbatasan aktivitas (*activity limitations*), dan pembatasan partisipasi (*participation restrictions*). Disabilitas menggambarkan interaksi antara seseorang dengan kondisi kesehatannya dan faktor-faktor kontekstual, baik dari lingkungan fisik maupun sosial. Di Indonesia, disabilitas didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lain berdasarkan prinsip kesetaraan hak

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nganjuk

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
Jawa Timur	Nganjuk	2020	4.8
Jawa Timur	Nganjuk	2021	4.98
Jawa Timur	Nganjuk	2022	4.74
Jawa Timur	Nganjuk	2023	4.68
Jawa Timur	Nganjuk	2024	3.87

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Nganjuk, (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nganjuk dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nganjuk periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 4,80 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,98 persen, yang diduga sebagai dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi ketersediaan lapangan kerja.

Sejak tahun 2022, TPT menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022, TPT menurun menjadi 4,74 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2023 menjadi 4,68 persen. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana TPT hanya mencapai 3,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk, yang bisa dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan program pelatihan kerja, serta peran pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sempat meningkat pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk berhasil ditekan hingga di bawah 4 persen pada tahun 2024.

Tabel 1. 2 Data Penyandang Disabilitas Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Ada Penyan dang Cacat	Jenis Kecatatan			
		Tuna netra	Tuna rungu	Tuna wicara	Tuna rungu- wicara
Pacitan	171	132	114	117	81
Ponorogo	306	225	175	187	160
Trenggalek	156	137	108	98	99
Tulungagung	270	202	140	184	135
Blitar	248	189	137	173	154
Kediri	343	248	204	220	151
Malang	380	285	190	218	234
Lumajang	203	169	111	131	112
Jember	230	202	170	183	165
Banyuwangi	215	177	125	154	121
Bondowoso	217	179	120	137	107
Situbondo	133	111	95	99	76
Probolinggo	328	259	194	200	207
Pasuruan	360	251	190	201	189
Sidoarjo	334	217	143	186	177
Mojokerto	298	178	128	148	132
Jombang	306	236	202	192	195
Nganjuk	280	172	137	162	119
Madiun	204	122	95	125	103
Magetan	234	135	80	116	99
Ngawi	213	144	124	132	119
Bojonegoro	408	252	187	247	207
Tuban	325	231	164	207	180
Lamongan	456	282	247	270	238
Gresik	339	197	136	164	146
Bangkalan	249	193	140	161	137
Sampang	186	163	119	102	112
Pamekasan	181	141	122	115	108

Kabupaten/Kota	Ada Penyang dan Cacat	Jenis Kecatatan			
		Tuna netra	Tuna rungu	Tuna wicara	Tuna rungu-wicara
Sumenep	331	268	239	207	209
Kota Kediri	43	27	19	17	19
Kota Blitar	21	15	2	10	11
Kota Malang	57	49	23	23	39
Kota Probolinggo	29	20	14	15	12
Kota Pasuruan	34	22	9	10	19
Kota Mojokerto	18	15	5	9	5
Kota Madiun	26	12	13	12	6
Kota Surabaya	151	111	75	75	86
Kota Batu	24	19	16	14	13
JAWA TIMUR	8 307	5 987	4 512	5 021	4 482

Sumber: BPS Jawa Timur, (2019)

Provinsi Jawa Timur berdasarkan BPS Jawa Timur, terdapat 28.309 jiwa penyandang disabilitas di Jawa Timur. Dengan total penduduk Jawa Timur terdapat 40.66 juta jiwa. Kabupaten Nganjuk terletak di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk mencapai 1.1 juta jiwa dan penyandang disabilitas mencapai 870 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Tabel 1. 3 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Nganjuk

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
	L	P	L/P
SAWAHAN	33	19	52
NGETOS	31	25	56
BERBEK	51	26	77
LOCERET	64	48	112
PACE	58	49	107
PRAMBON	64	37	101
NGRONGGOT	64	42	106
KERTOSONO	67	47	114
PATIANROWO	55	32	87
BARON	51	33	84
TANJUNGANOM	129	95	224
SUKOMORO	41	24	65

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
	L	P	L/P
NGANJUK	82	49	131
BAGOR	73	45	118
WILANGAN	21	12	33
REJOSO	68	34	102
GONDANG	63	40	103
NGLUYU	18	8	26
LENGKONG	32	29	61
JATIKALEN	20	12	32
Total	1,085	706	1,791

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (2023)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 1.791 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.085 laki-laki dan 706 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas laki-laki di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan selisih 379 orang.

Berdasarkan wilayah kecamatan, jumlah penyandang disabilitas terbesar terdapat di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 224 orang (129 laki-laki dan 95 perempuan). Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Nganjuk dengan total 131 orang (82 laki-laki dan 49 perempuan), kemudian Kecamatan Bagor dengan 118 orang (73 laki-laki dan 45 perempuan), serta Kecamatan Kertosono dengan 114 orang (67 laki-laki dan 47 perempuan). Keempat kecamatan tersebut menjadi penyumbang tertinggi jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit adalah Kecamatan Ngluyu dengan total 26 orang (18 laki-laki dan 8 perempuan), disusul oleh Kecamatan Jatikalen sebanyak 32 orang (20 laki-laki dan 12 perempuan), serta Kecamatan Wilangan dengan 33 orang (21 laki-laki dan 12 perempuan). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi yang cukup signifikan antar kecamatan.

Dari aspek gender, seluruh kecamatan menunjukkan kecenderungan bahwa penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun pada beberapa wilayah perbedaan jumlahnya relatif kecil, seperti di Kecamatan Lengkong dengan 32 laki-laki dan 29 perempuan. Banyaknya para penyandang disabilitas tersebut diperlukan pemberdayaan yang lebih, dalam hal ini peran pemerintah sangat utama dalam pemberdayaan para penyandang disabilitas ini.

Negara sudah mengatur Undang-Undang No. 8 Tahun (2016) tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa "pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah diwajibkan untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 2% penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai, sementara perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total pegawai mereka". Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 22,40 juta jiwa, lalu angkatan kerja penyandang disabilitas sebesar 10,9 juta jiwa, yang bekerja sebesar 9,91 juta jiwa, dan jumlah penyandang disabilitas yang menganggur adalah sebesar 289.407 jiwa (Larasati et al., 2023). Banyaknya penyandang disabilitas yang menganggur ini menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran tentang pemenuhan penyandang disabilitas dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% masih belum terpenuhi dengan baik. (Yulianto & Eny, 2021).

Penyandang disabilitas menjadi golongan yang paling banyak menerima diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, serta tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas patutnya mendapat hak-hak yang sama seperti layaknya non penyandang disabilitas dikhususkan hal pekerjaan, karena

banyak dari para penyandang disabilitas memiliki taraf ekonomi yang rendah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,97 juta orang, yang setara dengan sekitar 8 persen dari total populasi. Sebagian besar dari penyandang disabilitas ini, yakni sekitar 71,44 persen, terlibat dalam sektor informal. Secara ekonomi, penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kemiskinan dan kelaparan dibanding non-penyandang disabilitas karena terbatasnya akses pada sektor ketenagakerjaan dan status informalitasnya (Thohari et al., 2024).

Hasil penelitian Feminasary (2016) pelaksanaan program pelatihan kerja untuk meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Siwi Kabupaten Bantul pada tahun 2016 menunjukkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja di panti terlaksana dengan bagus, dengan berbagai pelatihan yang disediakan oleh pihak panti. Namun, implementasi pelatihan kerja di Panti Asuhan Bina Siwi ini belum dapat memenuhi target kuota 1% sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016. Oleh karena itu penelitian ini juga untuk melihat bagaimana implementasi program serupa tetapi di Kota Surabaya

Hasil penelitian Alizah & Mawar (2024) tentang implementasi kebijakan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja Kabupaten Tangerang menemukan pelaksanaan kebijakan telah melakukan berbagai cara agar mau mempekerjakan tenaga kerja disabilitas, tapi masih banyak yang belum mempekerjakan disabilitas sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap pola komunikasi dan koordinasi.

Fenomena yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, di mana mereka melamar hampir 50 kali namun tidak mendapatkan hasil, menunjukkan kesulitan yang besar.

"Saya telah melamar hampir 50 pekerjaan, tetapi hasilnya selalu kosong, hanya sampai satu, dua, atau tiga tahap, kemudian tidak ada kejelasan." (Takwani Suci Prestanti, dikutip dari berita Kisah penyandang disabilitas mencari kerja: 'Hampir 50 kali melamar lowongan tapi hasilnya nihil')

Banyak perusahaan yang menolak lamaran dengan berbagai alasan. Beberapa perusahaan memberi kesempatan untuk wawancara, tetapi setelah itu tidak ada informasi lebih lanjut.

Program pelatihan disabilitas mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2017. 17 Tujuan TPB tersebut salah satunya menjelaskan tentang jaminan pendidikan inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengadakan *Job Fair*, pelatihan berbasis kompetensi, dan juga pelatihan yang dikhususkan teruntuk disabilitas. Program ini diberdayakan sebagai bentuk dukungan terhadap inklusivitas agar dapat mencapai kemandirian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada studi pendahuluan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berupaya memberdayakan para penyandang disabilitas agar memiliki keahlian untuk memasuki dunia kerja dengan mengadakan beberapa kegiatan, antara lain pemberian motivasi, pelatihan kerja, informasi mengenai lowongan pekerjaan, dan pembekalan berwirausaha untuk memanfaatkan keterampilan yang didapatkan melalui pelatihan tersebut. Tujuan program yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mengurangi angka kemiskinan

dan pengangguran yang didapat oleh para penyandang disabilitas dan mengurangi ketergantungan para penyandang disabilitas bekerja di sektor informal. Bentuk perwujudan kebijakan pelatihan ini langsung melibatkan para penyandang disabilitas dan juga fasilitator dalam proses pembelajaran yang prakteknya dilakukan secara intensif. Kualifikasi untuk para penyandang disabilitas tidak sulit dan hanya memerlukan kartu identitas berupa KTP, dan harus mengikuti pelatihan sampai selesai. Hal ini ditunjukkan agar output dari pelatihan ini dapat diserap secara maksimal oleh penyandang disabilitas.

Kontribusi dan peran Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk melakukan pendekatan langsung dan edukasi untuk para penyandang akan pentingnya program pelatihan tersebut sebagai wadah untuk berkembang, dan juga *sharing* pengalaman dalam bekerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melakukan pemberdayaan terhadap para penyandang disabilitas agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan, dan lebih mandiri dalam proses bekerja sehingga mereka tidak terjebak dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Program pelatihan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dalam proses bekerja.

Implementasi program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas. Program ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, komputer, dan kerajinan tangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi lokal daerah. Selain itu, dinas juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta maupun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperluas akses

serta memperkuat kurikulum pelatihan. Dengan demikian, implementasi program ini tidak hanya berfokus pada transfer keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan soft skill, pendampingan, serta pembinaan kewirausahaan sebagai bekal agar peserta lebih siap bersaing di dunia kerja.

Hasil implementasi program pelatihan kerja tersebut menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan kemandirian peserta, meskipun tingkat keberhasilan bervariasi pada masing-masing jenis pelatihan. Sebagian besar lulusan mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh untuk mendapatkan pekerjaan maupun memulai usaha mandiri, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Nganjuk. Bagi penyandang disabilitas, pelatihan ini memberi dampak positif berupa peningkatan rasa percaya diri, partisipasi sosial, serta peluang ekonomi yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal keberlanjutan pendampingan, keterbatasan akses pasar, dan minimnya jaringan kerja sama dengan sektor industri yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil implementasi ini menjadi landasan penting bagi evaluasi dan perbaikan program pelatihan ke depan, agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi inklusif di daerah.

Program pelatihan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sudah berjalan selama periode tahun 2023-2025 dalam perwujudan pembangunan ekonomi inklusif. Adanya implementasi program pelatihan disabilitas di Kabupaten Nganjuk, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk menargetkan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas, namun pada praktiknya, pasti terdapat berbagai permasalahan yang menjadi daya Tarik untuk diteliti sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan, memiliki beberapa masalah dalam mengimplementasikan program seperti dari partisipasi peserta, keterbatasan sumber daya, keterbatasan perlengkapan, selain itu faktor pihak eksternal untuk implementasi program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat perlu dilakukan penelitian tentang implementasi Program Pelatihan Kerja Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti ialah bagaimana Implementasi Program Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini ditujukan guna menganalisis Implementasi Program Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara positif. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis: Manfaat penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat membantu dan memberi manfaat pada dunia pendidikan dan diharapkan menambah wawasan terkait implementasi program pelatihan kerja.
2. Manfaat Praktis: Manfaat penelitian ini mampu dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dan mampu menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.